



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## UPAYA PENINGKATAN TAX RATIO TAHUN 2023

**Eka Budiyantri**  
Peneliti Ahli Madya  
[eka.budiyantri@dpr.go.id](mailto:eka.budiyantri@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati untuk melebarkan target rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* pada tahun 2023 dari yang sebelumnya 9,3% hingga 9,59% menjadi sebesar 9,3% hingga 10%. Target *tax ratio* tersebut menggambarkan kondisi ekonomi pada tahun 2023 masih dibayangi oleh ketidakpastian. Untuk itu, rentang target *tax ratio* yang lebar akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk merancang besaran *tax ratio* yang ideal.

Batas bawah *tax ratio* sebesar 9,3% menunjukkan ketidakpastian yang membayangi perekonomian pada tahun 2023. Sementara batas atas *tax ratio* yang ditetapkan sebesar 10% menunjukkan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dan optimisme pemerintah pada masa pemulihan ekonomi yang semakin membaik.

Target *tax ratio* ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan *tax ratio* tahun 2017-2021, kecuali tahun 2018. Pada tahun 2018, *tax ratio* meningkat menjadi 10,24%. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami *booming commodity*. Kemudian pada tahun 2019, harga komoditas mulai normal sehingga *tax ratio* turun menjadi 9,77%. Lalu pada tahun 2020, *tax ratio* turun lagi menjadi 8,32%. Hal tersebut dikarenakan penerimaan pajak berkontraksi 16,8% akibat pandemi Covid-19.

Target *tax ratio* pada tahun 2023 juga tidak terlepas dari besarnya penerimaan negara pada tahun 2022 yang diperkirakan sebesar Rp1.784 triliun atau tumbuh 15,3% secara *year on year* (yoy). Penerimaan negara sebesar Rp1.784 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp1.485 triliun serta penerimaan bea dan cukai Rp299 triliun. *Outlook* penerimaan perpajakan pada tahun 2022 tersebut juga jauh lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp1.510 triliun yang ditopang oleh harga komoditas global. Walaupun perekonomian Indonesia baru tumbuh 3,7% pada tahun 2021 namun rasio pajak meningkat cukup tajam dari 8,32% menjadi 9,12%.

Adapun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada tahun 2023 adalah dengan melanjutkan tren peningkatan pajak dengan menjaga efektivitas UU HPP, pemberian insentif fiskal secara terukur, penggalan potensi perpajakan, dan penegakan hukum. Peluang peningkatan *tax ratio* masih cukup terbuka namun butuh upaya perbaikan menyeluruh baik dari sisi kebijakan, administrasi, dan kepatuhan pajak. Transisi kebijakan pajak juga membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai pembayar pajak. Selain itu juga diperlukan perencanaan dan mitigasi yang tepat terutama dalam kondisi perekonomian yang sangat dinamis seperti saat ini. Tahun 2022 yang diharapkan menjadi tahun pemulihan bagi banyak negara, kini dibayangi oleh kenaikan harga (inflasi) global akibat gangguan pasokan, terutama pada pangan dan energi, serta akibat adanya konflik di Ukraina. Hal ini menjadi tantangan baru bagi proses pemulihan.

## Atensi DPR

Dalam rangka upaya meningkatkan *tax ratio* yang diperlebar menjadi 9,3% - 10% maka ada beberapa atensi yang perlu DPR RI, khususnya Komisi XI, lakukan. Pertama, Komisi XI perlu mendorong pemerintah untuk terus menggali potensi penerimaan pajak. Kedua, Komisi XI perlu mengawasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio*. Ketiga, Komisi XI juga perlu mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memperkuat kondisi fiskal dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan keempat, Komisi XI perlu mengingatkan pemerintah untuk mencari alternatif penopang penerimaan negara yang tidak bergantung pada komoditas mengingat masih adanya kemungkinan ketidakpastian global baik dalam kebijakan moneter maupun sistem perdagangan internasional terjadi sampai tahun depan.

### Sumber

bisnis.com., 13 Juni 2022;  
*Kompas*, 14 Juni 2022;  
kompas.com., 13 Juni 2022;  
*Republika*, 14 Juni 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd\_official

#### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

#### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Riyadi Santoso  
Ari Muliarta Ginting  
Venti Eka Satya  
Rafika Sari

#### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

### EDITOR

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022